

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn)**

**Gushendra Suhana**

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas self-assessment dimana importir diminta untuk memberitahukan pemberitahuan impor. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana penyelundupan yang terjadi salah satu bentuknya adalah penyelundupan barang impor. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara, maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn serta Analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest diatur dalam UU No.17 Tahun 2006 Kepabeanan dan Permenkeu No. 203/PMK. 04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn bahwa memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru, maka sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor adalah barang yang dibawa oleh terdakwa adalah barang-barang konsumsi impor yang tidak memiliki izin dan sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat. Maka penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menguatkan putusan tingkat pertama karena putusan terlalu ringan dan tidak maksimal serta tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Mengangkut Barang, Impor, Manifest.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF TRANSPORTING IMPORTED GOODS THAT ARE NOT LISTED IN THE MANIFEST (Study of High Court Decision No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn)**

**Gushendra Suhana**

*The customs system in Indonesia adheres to the principle of self-assessment where importers are asked to provide import notifications. This proves that there is still the practice of importing goods illegally which do not comply with the provisions of the laws and regulations. One form of smuggling crime that occurs is smuggling of imported goods. This is of course very detrimental to the government in terms of state revenue, and is very disturbing to society in terms of economic stability at the moment.*

*The problem in this thesis research is how the criminal law regulates the criminal act of transporting imported goods that are not listed in the manifest and the legal considerations of the panel of judges regarding decision Number 942/Pid/2021/PT.Mdn as well as the legal analysis of the criminal act of transporting imported goods that are not listed in the manifest.*

*The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.*

*The conclusion in this thesis research is that the regulation of criminal law regarding the criminal act of transporting imported goods that are not listed in the manifest is regulated in Law No. 17 of 2006 on Customs and Minister of Finance Regulation no. 203/PMK. 04/2017 concerning provisions for the export and import of goods carried by passengers and crew of transport facilities. The panel of judges' legal considerations regarding decision Number 942/Pid/2021/PT.Mdn that the Public Prosecutor's memorandum of appeal and the counter-memory of appeal submitted by the Defendant in principle do not raise anything new, therefore agree with the consideration of the Panel of First Instance Judges regarding qualifications the criminal act committed by the Defendant as well as the length of the sentence imposed and has reflected a sense of justice for the community. The legal analysis of the criminal act of transporting imported goods is that the goods carried by the defendant are imported consumer goods that do not have a permit and are very dangerous if consumed by the public. So the author does not agree with the judge's decision which upheld the first instance decision because the decision was too light and not optimal and did not have a deterrent effect on the defendant.*

**Keywords : Crime, Transporting Goods, Import, Manifest.**